

Closed-Circuit Television (CCTV) Sebagai Pengawasan Digital di Lorong Wisata Kota Makassar

Andi Ainun Juniarsi Nur*, Wahyu Gunawan, Yogi Suprayogi Sugandi

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

*andi22019@mail.unpad.ac.id

Abstract

The rapid advancement of surveillance technology, particularly the adoption of Closed-Circuit Television (CCTV), has revolutionized public safety measures. In Makassar City's Lorong Wisata, CCTV serves as a critical tool for monitoring public spaces, reducing crime, and enhancing the sense of security. This study aims to explore the effectiveness and challenges of CCTV implementation as a digital surveillance mechanism. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews and observations involving local government officials, law enforcement, and community members, analyzed with NVivo 14 software. Results indicate that CCTV has significantly improved public safety by deterring crime and facilitating law enforcement investigations. However, concerns about privacy infringement and the psychological "chilling effect" are prominent, as constant surveillance influences community behavior and limits personal freedom. Furthermore, the potential misuse of collected data raises additional privacy concerns. This study emphasizes the importance of transparent regulations, active community engagement, and periodic evaluations to balance public safety and individual privacy. Holistic approaches integrating technology with social reform are necessary to ensure effective and ethical surveillance practices.

Keywords: CCTV; Surveillance; Public Safety; Privacy; Behavior

Abstrak

Kemajuan teknologi pengawasan, khususnya penerapan Closed-Circuit Television (CCTV), telah merevolusi cara menjaga keamanan publik. Di Lorong Wisata Kota Makassar, CCTV menjadi alat penting dalam memantau ruang publik, menurunkan tingkat kejahatan, dan meningkatkan rasa aman. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas dan tantangan implementasi CCTV sebagai mekanisme pengawasan digital. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo 14. Hasil menunjukkan CCTV secara signifikan meningkatkan keamanan publik dengan mencegah tindak kejahatan dan mendukung investigasi hukum. Namun, kekhawatiran terkait pelanggaran privasi dan *chilling effect* psikologis muncul, di mana pengawasan terus-menerus memengaruhi perilaku masyarakat dan membatasi kebebasan individu. Potensi penyalahgunaan data yang dikumpulkan juga menambah kekhawatiran privasi. Penelitian ini menekankan pentingnya regulasi yang transparan, keterlibatan masyarakat aktif, dan evaluasi berkala untuk menyeimbangkan keamanan publik dan perlindungan privasi individu. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan teknologi dengan reformasi sosial diperlukan untuk memastikan pengawasan yang efektif dan etis.

Kata Kunci: CCTV; Pengawasan; Keamanan Publik; Privasi; Perilaku

Pendahuluan

Peningkatan pesat dalam teknologi pengawasan, terutama penggunaan *Closed-Circuit Television* (CCTV), telah mengubah cara pemerintah dan institusi menjaga keamanan publik. Di berbagai kota besar di seluruh dunia, termasuk Indonesia, CCTV telah menjadi alat utama dalam memantau aktivitas masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan membantu investigasi hukum. Tujuan utama dari implementasi CCTV di ruang publik adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat (Oram, 2011). Namun, di balik manfaat yang jelas dari pengawasan CCTV, muncul kekhawatiran terkait privasi dan hak kebebasan individu. Banyak yang merasa bahwa keberadaan kamera di hampir setiap sudut kota dapat menciptakan perasaan selalu diawasi, bahkan dalam situasi di mana seseorang tidak melakukan pelanggaran apa pun.

Kekhawatiran ini semakin diperparah oleh perkembangan teknologi pengawasan yang lebih canggih, seperti penggunaan pengenalan wajah dan analisis data perilaku, yang dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan data (Goold, 2019; Bryan, 2018; Glasbeek, 2020). Menyeimbangkan antara kebutuhan akan keamanan publik dan perlindungan privasi individu menjadi tantangan yang semakin kompleks. Masyarakat modern menghadapi dilemma di satu sisi, masyarakat menginginkan perlindungan yang ditawarkan oleh teknologi pengawasan, namun di sisi lain, mereka juga mengkhawatirkan dampak negatifnya terhadap kebebasan pribadi. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan penting tentang bagaimana kebijakan pengawasan digital, termasuk penggunaan CCTV, dapat diimplementasikan secara adil dan transparan, sehingga keamanan terjaga tanpa mengorbankan hak-hak privasi warga negara (Power et al., 2021).

Meskipun CCTV menawarkan banyak manfaat bagi keamanan publik, implementasinya tidak lepas dari tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa pengawasan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki akses terhadap data yang dihasilkan. Pengawasan yang tidak diatur dengan baik dapat menimbulkan risiko pelanggaran privasi, terutama jika data yang dikumpulkan digunakan untuk tujuan di luar keamanan publik, seperti komersialisasi data atau penyalahgunaan oleh pihak berwenang (Lustgarten, 2002; Norris & Armstrong, 2020). Selain itu, ketergantungan yang berlebihan pada CCTV sering kali dianggap sebagai solusi cepat untuk masalah keamanan, padahal faktor-faktor lain seperti pencegahan kriminalitas, reformasi sosial, dan keadilan sosial juga berperan penting.

CCTV mungkin dapat merekam tindak kejahatan, namun tidak selalu efektif dalam mencegahnya. Beberapa kritik menyebutkan bahwa keberadaan CCTV dapat menciptakan ketergantungan yang berlebihan pada teknologi, sementara pendekatan yang lebih holistik untuk mengatasi masalah sosial sering kali diabaikan (Goold, 2012; McCahill, 2004; Squires, 2006; Walby, 2009). Di sisi lain, pengawasan melalui CCTV dapat memberikan efek psikologis pada masyarakat, yang sering disebut sebagai *chilling effect* sebuah fenomena di mana individu merasa tidak nyaman dan menahan diri dalam berperilaku bebas karena takut diawasi. Hal ini bisa berdampak negatif pada kehidupan publik dan menciptakan atmosfer yang kurang nyaman di ruang-ruang umum (Ainun et al., 2023; Foucault, 1977).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan pengawasan publik, khususnya melalui CCTV, dapat diimplementasikan secara efektif sambil tetap memperhatikan hak privasi individu. Kajian ini juga akan membahas berbagai perspektif terkait pengaruh pengawasan terhadap kebebasan individu, serta pentingnya regulasi dan transparansi dalam penerapan teknologi pengawasan. Dengan demikian, penting untuk memahami bagaimana kebijakan pengawasan publik melalui CCTV dapat mencapai keseimbangan antara menjaga keamanan dan melindungi privasi individu. Artikel ini

akan mengkaji berbagai tantangan dan implikasi dari implementasi CCTV di ruang publik, serta upaya-upaya yang diperlukan untuk memastikan pengawasan yang efektif tanpa mengorbankan hak-hak privasi masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggali informasi mengenai CCTV Sebagai Pengawasan Masyarakat Lorong Wisata di Kota Makassar, Kota Makassar. Pendekatan ini penting dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti melakukan pengamatan yang mendalam guna mengungkap substansi dari fenomena yang diteliti. Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Kota Makassar (Diskominfo, Kecamatan, Kelurahan, dan RT/RW), Pihak Kepolisian, dan Masyarakat yang terlibat di Lorong Wisata Kota Makassar, dengan total 10 informan. Proses pengumpulan data dimulai dengan melakukan wawancara dan observasi mendalam pada para informan di lokasi tersebut. Pemilihan informan dianggap representatif untuk menggambarkan proses pengawasan masyarakat Lorong Wisata di Kota Makassar melalui CCTV. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer, yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal dan dokumen pendukung lainnya terkait CCTV sebagai pengawasan masyarakat Lorong Wisata di Kota Makassar. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo 14, yang memiliki fitur-fitur yang memungkinkan penggunaannya melakukan analisis kualitatif dan metode campuran serta mengimpor berbagai file multimedia. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dengan input data, pengkodean, analisis tematik, hingga penarikan kesimpulan, seperti pada gambar berikut.



Gambar 1. Proses Analisis Data
(Sumber: Diolah Peneliti, 2024)

Hasil dan Pembahasan

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat dan pemerintah menjaga keamanan publik. Salah satu inovasi yang menjadi sorotan adalah penggunaan CCTV sebagai alat pengawasan modern. CCTV tidak hanya digunakan untuk merekam kejadian, tetapi juga sebagai alat deteksi dini, pencegahan kejahatan, dan pengumpulan bukti hukum (Gega & Cahya, 2021). Sebagai bentuk pengawasan baru, CCTV menawarkan keunggulan yang tidak dimiliki oleh metode konvensional, seperti patroli fisik oleh petugas keamanan (Matczak et al., 2023). Dengan kemampuan pengawasan yang terus menerus dan luas, CCTV memberikan solusi yang lebih efisien dalam memantau aktivitas di ruang publik.

Kamera pengawas ini dapat ditempatkan di berbagai lokasi strategis, seperti jalan raya, lorong kota, taman, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum lainnya, untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman (Weilsh & Farrington, 2009). Namun, pengawasan melalui CCTV tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana implementasinya memengaruhi masyarakat. Kehadiran CCTV sering kali memberikan rasa aman bagi sebagian orang, namun dapat pula menimbulkan kekhawatiran terkait privasi dan kebebasan individu (Tran et al., 2022). Dalam pengawasan berbasis teknologi ini, muncul perdebatan tentang batasan antara melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan dan melindungi hak privasi mereka.

Sebagai pengawasan baru, keberhasilan CCTV sangat bergantung pada regulasi yang adil, transparansi dalam penggunaan data, dan keterlibatan masyarakat dalam menyusun kebijakan pengawasan. Dengan pendekatan yang tepat, CCTV dapat menjadi alat pengawasan yang tidak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap teknologi pengawasan digital. Studi ini mendukung literatur sebelumnya Büchi et al. (2022); Kappeleir et al. (2023); Stoycheiff (2023) yang menunjukkan bahwa pengawasan CCTV dapat menimbulkan *chilling effect* pada masyarakat. Fenomena ini terlihat jelas dalam hasil penelitian, di mana beberapa individu merasa kurang nyaman untuk berekspresi bebas karena takut diawasi.

Selain itu, pengumpulan data secara masif melalui CCTV menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan data, seperti penggunaan untuk tujuan komersial atau penyalahgunaan oleh pihak tertentu. Hasil ini juga mengindikasikan pentingnya regulasi yang transparan dalam implementasi teknologi pengawasan. Tanpa adanya regulasi yang jelas, risiko pelanggaran hak privasi masyarakat menjadi lebih tinggi. Pendekatan holistik yang mencakup regulasi ketat, edukasi masyarakat, dan integrasi teknologi yang bertanggung jawab perlu dilakukan untuk memastikan keseimbangan antara keamanan publik dan perlindungan privasi individu (Coin, 2019; Hissa & Araújo, 2021; Perakslis, 2017).

Pengawasan digital melalui CCTV di Lorong Wisata Kota Makassar telah berhasil menciptakan lingkungan yang lebih aman. Efek jera yang ditimbulkan dari keberadaan kamera pengawas mampu mengurangi tindakan kriminalitas, sebagaimana diungkapkan oleh informan. Namun, efektivitas ini tidak terlepas dari tantangan yang signifikan, khususnya terkait privasi individu. Grafik 3 menunjukkan efek pengawasan CCTV terhadap masyarakat, khususnya dalam aspek perubahan perilaku warga, peningkatan partisipasi, dan kekhawatiran terkait privasi. Pengawasan melalui CCTV menciptakan berbagai efek, baik secara psikologis maupun perilaku, yang memengaruhi kehidupan sehari-hari warga. Salah satu dampak utama adalah perubahan perilaku warga yang menjadi lebih berhati-hati saat berada di area publik yang terpantau.

Efek ini membuat warga mengontrol tindakan mereka, menghasilkan penyesuaian perilaku di tempat-tempat yang diawasi. Selain itu, adanya CCTV turut mendorong peningkatan partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan. Warga merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk mendukung upaya keamanan, karena pengawasan tersebut meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif. Namun, pengawasan CCTV juga menimbulkan kekhawatiran terhadap privasi. Banyak warga yang merasa bahwa keberadaan CCTV bisa mengganggu privasi dan membatasi kebebasan individu, menciptakan perasaan selalu diawasi. Hal ini menimbulkan efek psikologis tertentu yang dikenal sebagai *chilling effect* di mana individu merasa kurang bebas untuk beraktivitas.

Meskipun CCTV memberikan rasa aman bagi sebagian orang, efek psikologis ini menjadi tantangan bagi keseimbangan antara rasa aman dan kebebasan pribadi. Terakhir, efek pengawasan ini secara umum berdampak pada perubahan perilaku masyarakat, baik secara sadar maupun tidak, di mana masyarakat cenderung lebih patuh pada aturan di bawah pengawasan ketat (Hongbao et al., 2006; Matczak et al., 2023). Secara keseluruhan, implementasi CCTV memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku dan perasaan masyarakat, yang perlu dikelola dengan bijaksana untuk mencapai keseimbangan antara keamanan dan kebebasan individu.

Untuk mencapai keseimbangan yang ideal antara keamanan publik dan privasi individu, penting bagi pihak berwenang dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan aspek regulasi dan transparansi dalam penggunaan CCTV. Regulasi yang jelas dan transparan dapat membantu mengurangi kekhawatiran masyarakat terkait penyalahgunaan data dan pengawasan yang berlebihan. Dengan regulasi yang tepat,

masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang batasan dan tujuan penggunaan CCTV, serta merasa yakin bahwa pengawasan ini benar-benar difokuskan untuk menjaga keamanan publik tanpa mengorbankan privasi. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pengawasan juga menjadi langkah penting.

Ketika masyarakat diberi ruang untuk menyuarakan pendapat dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, hal ini tidak hanya meningkatkan rasa kepercayaan terhadap pihak berwenang tetapi juga memberikan mereka pemahaman yang lebih mendalam tentang manfaat dan batasan pengawasan. Melibatkan masyarakat dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan serta kekhawatiran mereka. Di sisi lain, teknologi pengawasan yang semakin canggih juga menuntut adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi CCTV. Dengan pemantauan ini, pihak berwenang dapat memastikan bahwa CCTV benar-benar berfungsi sesuai dengan tujuannya dan tidak mengakibatkan efek samping yang merugikan, seperti peningkatan kecemasan atau ketidaknyamanan di ruang publik.

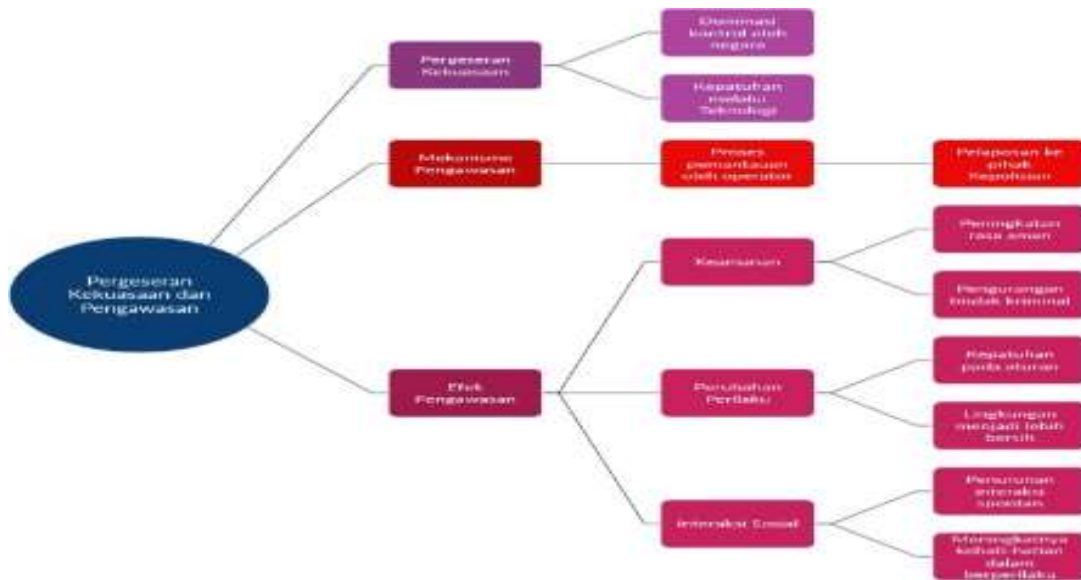
Evaluasi berkala juga memungkinkan penyesuaian strategi pengawasan yang lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan sosial. Dalam jangka panjang, pengawasan CCTV dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada keseimbangan antara teknologi dan kebijakan yang melindungi hak-hak individu. Dengan pendekatan yang bijaksana, pengawasan CCTV tidak hanya dapat meningkatkan keamanan tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan publik yang berbasis teknologi.

Berdasarkan hasil analisis dari data wawancara menggunakan fitur tersebut, ada salah satu fitur *software NVivo* untuk menampilkan teks secara visual adalah *Word Frequency Query*. Fitur ini membantu peneliti menampilkan frekuensi kata-kata yang menarik dan informatif. Berdasarkan hasil pencarian dengan fitur tersebut, diperoleh kumpulan kata yang paling sering muncul dalam data yang ditampilkan pada Gambar 5.4. Kata CCTV mendominasi percakapan dengan frekuensi 5,60% dari seluruh data, diikuti oleh kata keamanan, lorong, wisata dan pemasangan. Peneliti sajikan dalam bentuk *word cloud* sebagai berikut:



Gambar 2. Objek Kata Dalam Wawancara (*Word Cloud*)
(Sumber: Hasil Olahan Nvivo, 2024)

Dari hasil riset dan data dari informan di atas, proses selanjutnya adalah analisis data dengan membandingkan topik-topik yang telah dibuat dengan jawaban informan. Topik-topik atau transkrip dibuat berdasarkan garis besar jawaban informan dari hasil wawancara. Setiap pertanyaan memiliki data transkrip tersendiri yang nantinya menjadi topik utama dalam pembahasan. Namun sebelum menganalisisnya, dapat dibuat *mind mapping* atau peta topik-topik utama yang dibuat melalui NVivo 14.



Gambar 3. Mind Map Topik Utama dalam NVivo 14
(Sumber: Hasil Olahan Nvivo, 2024)

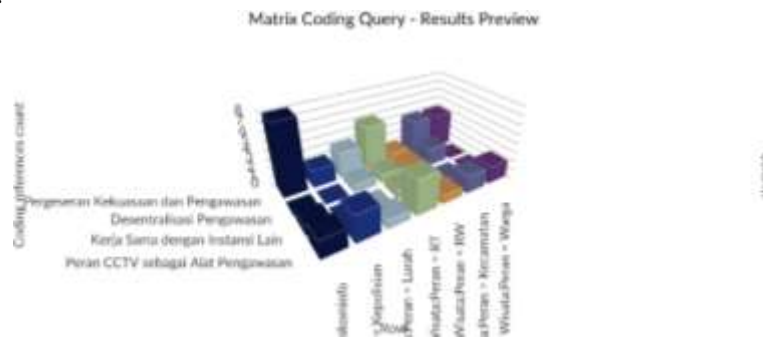
Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa permasalahan utama yaitu pergeseran kekuasaan dan pengawasan Masyarakat, berdasarkan hasil wawancara informan dapat diambil topik-topik utama yang berpengaruh pergeseran kekuasaan dan pengawasan Masyarakat diantaranya, 1) pergeseran kekuasaan dan pengawasan Masyarakat; topik ini menunjukkan adanya dominasi kontrol oleh negara serta kepatuhan yang diwujudkan melalui teknologi. Dalam hal ini, kekuasaan yang sebelumnya berada di tangan masyarakat atau individu mengalami pergeseran ke pihak yang lebih terpusat, yaitu negara dan teknologi, yang memengaruhi bagaimana individu menjalankan perilakunya, 2) Mekanisme pengawasan, mengalami perubahan di mana pengawasan kini lebih banyak dilakukan melalui proses pemantauan oleh operator.

Salah satu bentuk mekanisme ini adalah pelaporan kepada pihak kepolisian, yang memperlihatkan adanya kolaborasi antara teknologi pengawasan dan penegakan hukum dalam menjaga ketertiban sosial, 3) efek pengawasan, pergeseran kekuasaan dan pengawasan turut membawa perubahan dalam perilaku individu. Adanya kepatuhan pada aturan dan lingkungan yang lebih bersih menunjukkan bahwa pengawasan berperan penting dalam membentuk perilaku masyarakat. Namun, di sisi lain, pengawasan juga menyebabkan penurunan interaksi spontan dan meningkatnya kehati-hatian individu dalam berperilaku di ranah publik. Apabila dijabarkan per-sub topik maka akan terlihat jawaban terperinci dari setiap informan. Bentuk visualisasi per-sub topik dapat dilihat pada gambar 3.



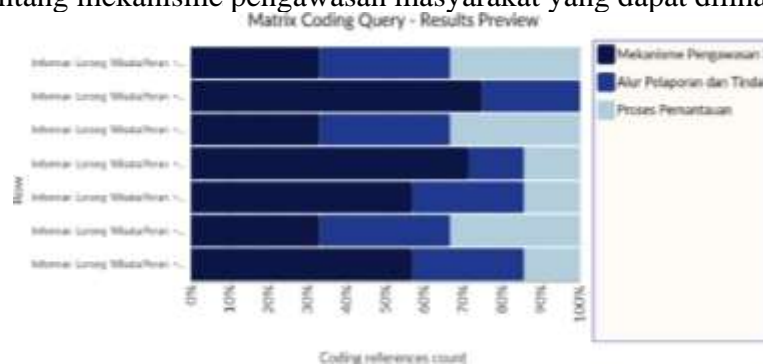
Gambar 4. Visualisasi Jawaban (*Hierarchy Chart*) pada NVivo 14
(Sumber: Hasil Olahan Nvivo, 2024)

Langkah selanjutnya adalah proses analisis data dengan membandingkan jabatan/peran informan dengan hasil wawancara. Tahapan dalam menganalisis data dengan jawaban hasil wawancara menggunakan *matrix coding query* pada NVivo 14. Data yang dianalisis adalah data per topik yang telah dibuat, sehingga dalam hal ini ada tiga hasil perbandingan atau tiga *matrix coding query*. *Matrix coding query* digunakan untuk membandingkan data hasil wawancara dibandingkan status demografi dari informan. Dalam hal ini akan membandingkan status jabatan/peran, usia, dan jenis kelamin dengan jawaban dari hasil wawancara. Perbandingan pertama adalah terkait pertanyaan tentang pergeseran kekuasaan dan pengawasan Masyarakat yang dapat dilihat pada grafik 1.



Grafik 1. Pergeseran Kekuasaan dan Pengawasan Masyarakat di LongWis Menurut Informan
(Sumber: Hasil Olahan Nvivo, 2024)

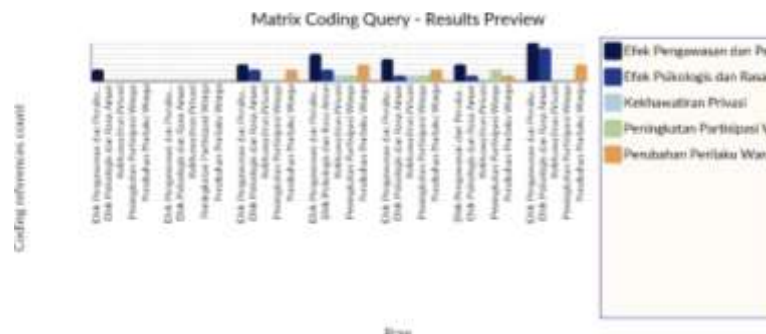
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan tingkat keterlibatan dan pengaruh di antara berbagai aktor dalam pengawasan dan pergeseran kekuasaan. Diskominfo memiliki keterlibatan yang paling dominan, menunjukkan bahwa peran mereka sangat penting dan signifikan dalam konteks pengawasan ini. RT dan Kecamatan juga berperan cukup kuat, meskipun tidak sebesar Diskominfo. Ini mungkin berarti bahwa RT dan Kecamatan memiliki tanggung jawab langsung yang terkait dengan pengawasan dan kekuasaan, namun perannya tidak sebesar yang dipegang oleh Diskominfo. Di sisi lain, Kepolisian, Lurah, dan Warga memiliki keterlibatan yang cukup, namun tidak sebesar peran Diskominfo, RT, atau Kecamatan. Perbandingan kedua adalah terkait pertanyaan tentang mekanisme pengawasan masyarakat yang dapat dilihat pada grafik 2.



Grafik 2. Mekanisme Pengawasan Masyarakat di LongWis Menurut Informan
(Sumber: Hasil Olahan Nvivo, 2024)

Grafik di atas menunjukkan hasil Matrix Coding Query dalam bentuk diagram batang horizontal yang menggambarkan distribusi referensi pengkodean dari wawancara atau observasi dengan informan terkait peran di lorong wisata. Terdapat tiga tema utama, yaitu Mekanisme Pengawasan, Alur Pelaporan dan Tindak Lanjut, serta Proses Pemantauan, yang diwakili dengan warna biru tua, biru sedang, dan biru muda. Setiap batang horizontal merepresentasikan kontribusi seorang informan terhadap ketiga tema tersebut, dengan panjang masing-masing warna menunjukkan persentase referensi untuk

setiap tema. Variasi panjang ini mencerminkan fokus atau perhatian yang berbeda dari tiap informan terhadap tema tertentu, sehingga memberikan gambaran tentang dominasi setiap tema dalam pemahaman informan mengenai peran di lorong wisata. Perbandingan kedua adalah terkait pertanyaan tentang efek pengawasan masyarakat yang dapat dilihat pada grafik 3.



Grafik 3. Efek Pengawasan Masyarakat di LongWis Menurut Informan
(Sumber: Hasil Olahan Nvivo, 2024)

Grafik ini menunjukkan hasil Matrix Coding Query dalam bentuk diagram batang vertikal untuk lima tema utama terkait peran lorong wisata efek Pengawasan dan Perubahan, efek Psikologis dan Rasa Aman, Kekhawatiran Privasi, Peningkatan Partisipasi Warga, dan Perubahan Perilaku Warga, yang ditandai dengan warna berbeda. Sumbu horizontal menunjukkan kategori informan, sementara sumbu vertikal menampilkan jumlah referensi pengkodean. Panjang batang mewakili jumlah referensi tiap tema untuk setiap informan, menggambarkan variasi perhatian informan terhadap tema tertentu dalam konteks lorong wisata.

Kesimpulan

Penggunaan CCTV sebagai alat pengawasan di Lorong Wisata Kota Makassar memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan keamanan publik. Keberadaannya membantu mencegah tindak kriminal, menciptakan rasa aman, dan mendukung proses penegakan hukum dengan pengumpulan bukti yang lebih efektif. Namun, implementasi teknologi ini juga menimbulkan tantangan, terutama terkait isu privasi. Banyak individu merasa diawasi secara terus-menerus, yang memengaruhi kebebasan berekspresi mereka, dikenal sebagai *chilling effect*. Selain itu, potensi penyalahgunaan data yang dikumpulkan menambah kekhawatiran akan privasi masyarakat. Oleh karena itu, regulasi yang jelas, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan CCTV berjalan sesuai tujuan tanpa melanggar hak individu. Dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan reformasi sosial dan evaluasi berkala, pengawasan melalui CCTV dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman tanpa mengorbankan kebebasan pribadi.

Daftar Pustaka

- Ainun, A., Nur, J., Gunawan, W., Zakaria, S., Yunita, D., & Lesmana, A. C. (2023). Pengawasan Terhadap Masyarakat: Panopticon Dan Post-Panopticon (Analisis Diferensiasi Pemikiran Michel Foucault-Deleuze & Guattari). *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 7(2), 178-194.
- Benjamin, J. G. (2019). Review of Lyon's *The Culture of Surveillance: Watching as a Way of Life*. *Surveillance & Society*, 17(4).
- Bryan, E. (2018). *The Culture Of Surveillance: Watching As A Way Of Life*. *Social & Cultural Geography*.

- Büchi, M., Festic, N., & Latzer, M. (2022). The Chilling Effects of Digital Dataveillance: A Theoretical Model and an Empirical Research Agenda. *Big Data and Society*, 9(1).
- Coin, F. (2019). Your Data Or Your Life. On Demonetisation, Cashlessness And The Digital Panopticon In India. *Sociologia Del Lavoro*, 154.
- Foucault, M. (1977). *Disiplin dan Hukuman*. London: Tavistock.
- Gega, R., & Cahya, K. B. P. (2021). Peran Kamera Pengawas Closed-Circuit Television (CCTV) dalam Kontra Terorisme. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 100-116.
- Glasbeek, A., & Lyon, D. (2018). The Culture of Surveillance: Watching as a Way of Life. *Security Journal*, 33(2).
- Goold, B. J. (2004). *CCTV And Policing: Public Area Surveillance And Police Practices In Britain*. Oxford University Press, USA.
- Hissa, D., & Araújo, N. (2021). Infodemics In The Infodemics In The Performance Society: Between The Pamphlet Wall And The Digital Panopticon. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 21(4), 1011-1035.
- Hongbao, L., Chuanjiu, W., & Fei, Q. (2006). Traffic Control And Surveillance System Of Guangzhou ITMS. *13th World Congress on Intelligent Transport Systems and Services*.
- Kappeler, K., Festic, N., & Latzer, M. (2023). Dataveillance Imaginaries And Their Role In Chilling Effects Online. *International Journal of Human-Computer Studies*, 179, 103120.
- Lustgarten, L. (2002). Book Review: The Maximum Surveillance Society: The Rise of CCTV. *Criminal Justice Review*, 27(1), 180-181.
- Matczak, P., Wójtowicz, A., Dąbrowski, A., & Mączka, K. (2023). Cost-Effectiveness Of CCTV Surveillance Systems: Evidence From A Polish City. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 29(4), 555-577.
- McCahill, M. (2004). CCTV and Policing: Public Area Surveillance and Police Practices in Britain. By Benjamin J. Goold (Oxford: Oxford University Press, 2004, 244pp. 50.00hb). *British Journal of Criminology*, 45(2).
- Norris, C., & Armstrong, G. (2020). *Towards The Maximum Surveillance Society*. The Maximum Surveillance Society.
- Perakslis, C. (2017). Digital Maturity: Perceiving The Digital-Panopticon. *IEEE Technology and Society Magazine*, 36(4), 88-88.
- Power, D. J., Heavin, C., & O'Connor, Y. (2021). Balancing Privacy Rights And Surveillance Analytics: A Decision Process Guide. *Journal of Business Analytics*, 4(2), 155-170.
- Squires, P. (2006). Book Review: CCTV and Policing: Public Area Surveillance and Police Practices in Britain, Reclaiming the Streets: Surveillance, Social Control and the City. *Theoretical Criminology*, 10(2), 259-263.
- Stoycheff, E. (2023). Cookies And Content Moderation: Affective Chilling Effects Of Internet Surveillance And Censorship. *Journal of Information Technology & Politics*, 20(2), 113-124.
- Tran, K., Nguyen, T., Phan, L., Tran, M., Trinh, M., & Pham, L. (2022). Stakeholders' Attitudes Towards The Installations Of Closed-Circuit Television Cameras In Reducing School Violence. *Heliyon*, 8(9).
- Walby, K. (2009). Book Review: Benjamin J. Goold CCTV and Policing: Public Area Surveillance and Police Practices in Britain Oxford: Oxford University Press, 2007. *Criminology & Criminal Justice*, 9(2), 247-249.
- Welsh, B. C., & Farrington, D. P. (2009). Public Area CCTV And Crime Prevention: An Updated Systematic Review And Meta-Analysis. *Justice Quarterly*, 26(4), 716.